



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**UNIT KERJA** : RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
**SUB UNIT KERJA** : BAGIAN TATA USAHA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAKHMAD SUCAHYO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
3. NHK : 153668

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 678 m2/120 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, WARISAN Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 369.367

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 772.369.367

**III. HUTANG** Rp. 200.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 572.369.367

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.